

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tingkat pengangguran yang ada di Kabupaten Bengkalis rendah karena mengalami penurunan dari tahun 2019-2021 namun di lain sisi berdasarkan data yang telah ada menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Kabupaten Bengkalis termasuk yang tertinggi diantara jumlah pengangguran yang ada di kabupaten lain di dalam provinsi Riau. Oleh sebab itu pula adanya pengelolaan yang dilakukan terhadap ketenagakerjaan yang ada sangat dibutuhkan dan diharapkan akan sangat membantu dalam hal pengurangan angka pengangguran yang ada di kabupaten Bengkalis. Dengan memanfaatkan peran dari masing-masing *Stakeholder* yang memang mengikuti kerja sama antar pihak dalam pengelolaan ketenagakerjaan yang ada, seperti pihak pemerintah atau Disnaker mengimplementasikan dari aturan yang ada dan bekerja sama dengan pihak perusahaan terkait adanya info dan juga penempatan untuk tenaga kerja, lalu masyarakat yang rajin dan juga mau ikut andil dalam hal berpartisipasi dan juga mendukung kebijakan, serta mengikuti program yang memang diadakan oleh pemerintah guna menambahkan kemampuan masyarakat dalam bersaing di dalam dunia kerja. Ketenagakerjaan sendiri merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja baik itu sebelum, selama dan sesudah masa kerja, ini diatur di dalam UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Adapun segala sesuatu yang bersangkutan dengan ketenagakerjaan pastilah berkaitan dengan tenaga kerja atau orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa yang nantinya itu berguna baik untuk dirinya sendiri ataupun masyarakat secara umum. Di dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bukan saja memberikan penjelasan mengenai ketenagakerjaan namun juga berisi mengenai hal pengaturan tentang kesempatan kerja, hak tenaga kerja dan lain sebagainya.

Pengelolaan ketenagakerjaan di Kabupaten Bengkalis dapat dikatakan sudah mulai membaik dan ada kemajuan, hal ini dinilai dari hasil data Badan Pusat

Statistik (BPS) Riau yang memperlihatkan data pengangguran di Kabupaten Bengkalis berkurang dari tahun 2019 yang mencapai 24.686 orang hingga menjadi 17.910 orang pengangguran pada tahun 2021. Hal ini dapat dicapai karena Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Bengkalis ikut berperan dalam meningkatkan pengelolaan ketenagakerjaan dengan dibantu dan juga didorong oleh pihak swasta dan masyarakat, yang mana ini dapat dikatakan bahwa pihak Dinas atau pemerintah membuat *Collaborative* (kolaborasi) dengan *Stakeholder* yang ada di daerah guna meningkatkan dan guna membantu dalam pengelolaan ketenagakerjaan serta mengurangi angka pengangguran yang ada di Kabupaten Bengkalis. Dengan mengadakan kerja sama yang memang dipimpin oleh Kepala Dinas langsung dan nantinya kerja sama akan di urus oleh bagian perbidangannya masing-masing, seperti kerja sama dalam bentuk penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja yang diadakan oleh izin Kepala Dinas dan didisposisikan kepada Bagian terkait. Yang nantinya akan mengumumkan tentang ada lowongan pekerjaan dan juga penyerapan serta perluasan kesempatan untuk dapat bekerja untuk masyarakat Kabupaten Bengkalis, adanya kerja sama dalam bentuk organisasi Bursa Kerja Khusus(BKK).

Namun dibalik keberhasilan yang dicapai dalam 3 tahun terakhir mengenai angka pengangguran yang berkurang di Kabupaten Bengkalis yang di dapatkan dari hasil kerja sama yang di jalankan ternyata Kabupaten Bengkalis belum cukup terlihat kemajuannya dalam mengurangi angka pengangguran yang ada di daerah jika dibandingkan dengan daerah lainnya, hal ini dikarenakan walaupun dari hasil data Badan Pusat Statistik (BPS) Riau angka pengangguran berkurang dalam 3 tahun terakhir, tapi tetap saja Kabupaten Bengkalis masih merupakan salah satu daerah yang ada di Riau dengan tingkat pengangguran tertinggi dibandingkan dengan daerah lainnya se provinsi Riau. Dengan data tersebut dapat di lihat berdasarkan tabel 1.2 tentang jumlah pengangguran yang ada di Provinsi Riau dan memperlihatkan bahwa Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu daerah yang memiliki jumlah pengangguran yang tinggi se Provinsi Riau dengan jumlah akhir pada tahun 2021 yaitu 17.910 orang. Dengan adanya spesifikasi yang tinggi yang

terdapat di perusahaan yang ada di Kabupaten Bengkalis membuat itu juga semakin menjadi bahan pertimbangan untuk dapat mengurangi angka pengangguran yang ada.

Kabupaten Bengkalis ada di Provinsi Riau dan merupakan salah satu dari 11 kabupaten atau kota yang terletak di Provinsi Riau. Wilayah Kabupaten Bengkalis mencakup daratan bagian pesisir Timur pulau Sumatra. Secara geografis, posisi wilayah Kabupaten Bengkalis pada posisi  $2^{\circ}30' - 0^{\circ}17'$  Lintang Utara dan  $100^{\circ}52' - 102^{\circ}10'$  Timur. Adapun sebelah Utara Kabupaten Bengkalis berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti, Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Rokan Hulu, serta Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kabupaten Bengkalis juga merupakan Kabupaten yang memiliki letak strategis di tepi jalur laut internasional yang juga tersibuk di dunia yaitu Selat Malaka dan serta merta merupakan kawasan segitiga pertumbuhan ekonomi Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-GT), yang di dalamnya memiliki atau terdapat banyak perusahaan-perusahaan besar baik ditingkat Nasional sampai tingkat internasional. Perusahaan-perusahaan itu kebanyakan berdiri atau berada di dekat atau daerah Tempat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker Trans) Kabupaten Bengkalis didirikan sekarang ini, lalu disebutkan banyak perusahaan nasional hingga Internasional dikarenakan terdapat perusahaan yang mengelola migas dari hasil Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Kabupaten Bengkalis yang dulu bergerak atau dimiliki oleh perusahaan asing, namun sekarang beberapa sudah menjadi milik atau dikelola oleh Negara Indonesia seperti PT. Pertamina.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker Trans) adalah salah satu dinas yang ada di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau yang mengatur dan juga mengelola dibidang ketenagakerjaan dan juga transmigrasi yang ada atau berjalan di Kabupaten Bengkalis. Namun dalam setiap perjalanan dan juga proses pada pengelolaan pastilah ada hal yang menjadi perhatian dan perlu kiranya untuk di teliti yang khususnya mengenai ketenagakerjaan yang akan dibahas pada skripsi

yang akan peneliti buat ini yang lebih kepada terkait pengelolaan Ketenagakerjaan yang mengarah ke hal bagaimanakah Peran yang dijalankan Disnaker Kabupaten Bengkalis dalam Pengelolaan ketenagakerjaan dan hubungan antar *Stackholder* yang ada.

Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis terletak di Jalan Pipa Air Bersih KM.125 Duri, Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2012, dan merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dipimpin oleh Kepala Dinas, dibantu 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Bidang dan 3 (tiga) Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan dari yang telah di jelaskan di atas mengenai jumlah pengangguran yang berkurang , maka berikut akan diterangkan pada tabel 1.1 mengenai jumlah pengangguran yang ada di Kabupaten Bengkalis dari tahun 2019 sampai tahun 2021:

**Tabel 1.1. Jumlah pengangguran di Kabupaten Bengkalis Tahun 2019, 2020,2021**

Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengangguran			
	Tahun	2019	2020	2021
Bengkalis	Data dalam angka	24.686	24.518	17.910
	Presentase penurunan tiap tahun dari tahun 2019		- 0,68 %	- 27,4 %
	Presentase penurunan tiap tahun		- 0,68 %	- 26,9%

Sumber: BPS Riau 2022

Pada tabel di atas dapat menunjukkan gambaran mengenai tingkat pengangguran yang ada di Kabupaten Bengkalis menurun dari tahun 2019 yang

berjumlah 24.686 menjadi 24.518 pada tahun 2020, hingga menjadi 17.910 orang pengangguran pada tahun 2021. Walaupun berdasarkan data yang ada terjadi penurunan jumlah pengangguran yang ada di Kabupaten Bengkalis tidak begitu banyak, namun hal ini dapat dijadikan gambaran bahwa Kabupaten Bengkalis (pemerintah) telah berupaya dalam mewujudkan pengelolaan ketenagakerjaan mengenai menurunkan angka pengangguran yang ada di Kabupaten Bengkalis. Lalu di bawah ini terdapat data mengenai jumlah pengangguran yang ada di Provinsi Riau dari tahun 2019 sampai tahun 2021, sebagai data yang menunjukkan perbandingan jumlah pengangguran yang ada di Provinsi Riau, sebagai berikut:

**Tabel 1.2. Jumlah Pengangguran Di Provinsi Riau Di Tahun 2019, 2020, 2021**

Kabupaten/Kota	Jumlah Pengangguran		
	2019	2020	2021
Bengkalis	24 686	24 518	17 910
Dumai	9 723	12 005	9 084
Indragiri Hilir	16 401	15 782	9 685
Indragiri Hulu	10 237	10 571	7 291
Kampar	21 954	23 911	16 797
Kepulauan Meranti	5 615	7 475	4 060
Kuantan Singingi	7 419	8 376	3 291
Pekanbaru (Cakupan Kota)	43 865	47 521	44 503
Pelalawan	11 235	14 223	5 915
Rokan Hilir	14 632	13 205	9 851
Rokan Hulu	15 054	13 958	7 537

Siak	9 322	12 292	9 745
RIAU (Se provinsi)	190 143	203 837	145 669

Sumber: BPS Riau 2022

Dari data di atas dapat dijabarkan bahwa tingkat pengangguran yang ada di Kabupaten Bengkalis rendah karena mengalami penurunan dari tahun 2019-2021 namun di lain sisi berdasarkan data yang telah ada menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Kabupaten Bengkalis termasuk yang tertinggi diantara jumlah pengangguran yang ada di kabupaten lain di dalam provinsi Riau. Adapun hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu seperti faktor klasifikasi yang diinginkan perusahaan yang ada di Kabupaten Bengkalis yang tinggi, daya saing tenaga kerja yang relatif rendah sehingga ada ketidakcocokan antara kemampuan dengan pekerjaan, pasar tenaga kerja yang rendah dimana lapangan kerja kurang berkualitas sehingga produktivitas dari tenaga kerja juga masih rendah, dan adanya ketidaksesuaian antara perusahaan dengan tenaga kerja dalam mengambil calon pekerja dan pekerjaan yang sesuai (Ahmad Soleh, 2017). Adapun terdapat data mengenai jumlah perusahaan asing dan tenaga kerja asing yang ada di Kabupaten Bengkalis, sebagai berikut:

**Tabel 1.3. Jumlah Perusahaan Asing Dan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Bengkalis Tahun 2019**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PERUSAHAAN YANG MEMPEKERJAKAN WARGA NEGARA ASING	JUMLAH TENAGA KERJA ASING
1	BANTAN	0	0
2	BUKIT BATU	0	0
3	MANDAU	14	1.193

<b>4</b>	RUPAT	0	0
<b>5</b>	RUPAT UTARA	0	0
<b>6</b>	SIAK KECIL	0	0
<b>7</b>	PINGGIR	6	0
<b>8</b>	BANDAR LAKSAMANA	0	0
<b>9</b>	TALANG MANDAU	0	0
<b>10</b>	BATHIN SOLAPAN	0	0
<b>JUMLAH</b>		20	1.193

Sumber: BPS Riau 2022

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa di daerah Kecamatan Mandau terdapat 14 perusahaan asing yang di dalam nya terdapat sekitar 1.193 orang Tenaga Kerja Asing (TKA), lalu ada 6 perusahaan asing yang berada di Kecamatan Pinggir yang berdasarkan data di 6 perusahaan itu tidak terdapat TKA. Sehingga dari hasil data gambar di atas menyatakan bahwa di Kabupaten Bengkalis terdapat 20 perusahaan asing dan 1.193 TKA. Kaitannya dengan hal yang dikemukakan di atas adalah dikarenakan jumlah perusahaan asing atau swasta yang memang banyak, ini dapat menjadi salah satu faktor kualifikasi tinggi yang dibutuhkan oleh perusahaan agar tenaga kerja dapat memadai syaratnya. Seperti calon tenaga kerja harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan seperti ahli pengelasan, perbaikan mobil angkut berat dan lain sebagainya, dan data ini dapat dilihat dari kegiatan pelatihan yang diadakan di daerah Kabupaten Bengkalis oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis yang kebanyakan tentang lowongan teknik atau kompetensi tertentu saja. Berikut data mengenai hasil sensus penduduk Kabupaten Bengkalis yang didapat dari Badan Pusat Statistik Riau yang akan di jelaskan pada gambar di bawah ini:

**Gambar 1.1. Hasil Sensus Penduduk 2020 Di Kabupaten Bengkulu**



Sumber : BPS.Riau 2021

Ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di wilayah Bengkulu masih tergolong kecil dilihat berdasarkan data tiga tahun terakhir yang ada di BPS Riau dari tahun 2019-2021 yang mana adanya penurunan angka pengangguran di Kabupaten Bengkulu, namun tetap harus diatasi dan diupayakan agar tetap minim, dikarenakan dalam dan dapat dilihat bahwa Kabupaten Bengkulu masih tinggi tingkat penganggurannya dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang ada di Riau serta dari pada itu bahwa keterwakilan pengurusan tentang pengelolaan ketenagakerjaan tetap perlu diperhatikan dalam pengurusannya dibidang pemerintahan, yang mana pemerintah dapat membantu dalam mengatur dan kepengurusan mengenai hal ini, dan *stakeholder* lainnya dapat membantu di bidang lainnya pula, namun tetap dengan tujuan yang sama. Lalu disebutkan pada gambar diatas bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu bertambah sebanyak 67.233 dari 2010 hingga 2020. Dengan jumlah milenial (1981-1994) 26,84% , gen Z (1997-2012) 28,83%, post gen Z (2013) 12,49%, *baby boomer* (1946-1964,57-75) 8,94%, gen X (1965-1980, 41-56) 21,93%. Dan dapat disimpulkan bahwa ada lebih banyak gen Z atau orang berusia 9-24 tahun di tahun 2020 di Kabupaten Bengkulu, dimana usia ini adalah usia yang sedang dalam motivasi tertingginya



dalam hal belajar dan juga bekerja.

*Collaborative governance* sendiri merupakan suatu konsep yang dikenal dalam artian kolaborasi atau kerja sama di dalam kegiatan pemerintahan yang berkaitan dengan beberapa aspek lainnya yang juga berfungsi sebagai pendukung dari geraknya kegiatan yang direncanakan atau dilakukan dalam kerja sama yang ada dan digunakan untuk mencapai serta memenuhi tujuan publik melalui individu ataupun organisasi (Donahue dan Zeckhauser, 2011:4). Dalam *collaborative governance* terdapat beberapa unsur-unsur yaitu berasal dari unsur pemerintah, unsur, swasta dan unsur masyarakat yang saling bekerja sama guna mencapai tujuan yang telah dibuat. Adapun kaitannya dengan pengelolaan ketenagakerjaan adalah dimana kolaborasi juga dapat dilakukan guna membantu dalam pengelolaan ketenagakerjaan dalam pengurusan beberapa hal seperti pengurangan tingkat pengangguran, membantu percepatan pencapaian tujuan dan kinerja yang ada untuk masing-masing terkait dalam kerja sama yang telah dijalin.

Di dalam Kabupaten Bengkalis pun terdapat cukup banyak Sumber Daya Manusia (SDM) yang diharapkan dapat masuk dan juga bekerja di perusahaan yang ada di daerah lokal mereka juga (Kabupaten Bengkalis). Dengan adanya perusahaan dan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada serta adanya *Collaborative governance* yang berjalan seperti dengan adanya pelatihan kerja di Disnaker, penginfoan tentang lowongan kerja dari perusahaan dan keikutsertaan masyarakat dalam pelatihan dan juga pelaporan kepada pemerintah atau tepatnya di sini kepada Disnaker, maka dari pada itu diharapkan dapat berdampak positif untuk Sumber Daya Manusia (SDM) ataupun Tenaga Kerja yang ada di Kabupaten Bengkalis, dan di dalam penelitian skripsi ini akan membahas bagaimana *Collaborative Governance* yang terjalin Dalam Pengelolaan Ketenagakerjaan Di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Masalah yang akan dibahas dan juga akan diteliti adalah mengenai bagaimana perjalanan proses *Colaborrative Governance* yang dijalankan di Kabupaten Bengkalis dimana dalam setiap proses pasti memiliki kendala dan juga memiliki hal-hal yang perlu diselesaikan, agar dapat menjadikan pengelolaan ketenagakerjaan yang dijalankan dengan adanya *collaborative governance*

berhasil dan dapat membantu mengurangi lebih banyak lagi pertumbuhan jumlah pengangguran yang ada, dan masalah mengenai pengelolaan ketenagakerjaan lainnya. Ditambah lagi untuk *stakeholder* yang memang berkaitan dengan Disnaker yang tidak bekerja sama dengan baik, untuk perlengkapan data daerah yang baik dan mencapai target kinerja yang diinginkan. Dan jika target dan kerja sama antar *stakeholder* yang ada telah baik dan terjalin baik, maka pembangunan untuk hal lainnya seperti pengelolaan ketenagakerjaan dapat berkembang dan berjalan dengan cepat dan tepat. Disebabkan hal tadi yang disebut diatas maka dapat diketahui akan ada banyaknya permasalahan terkait dalam pengelolaan dan juga hubungan antar *stackholder* timbul dan diharapkan dapat diselesaikan, yang mana itu akan dibahas di dalam skripsi ini.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan identifikasi masalah yang akan diambil, yaitu :

1. Bagaimana *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Ketenagakerjaan Di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau?
2. Bagaimana peran masing-masing unsur *collaborative governance* dalam pengelolaan ketenagakerjaan di Kabupaten Bengkalis?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang dapat dicapai di dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana *Collaborative Governance* dalam pengelolaan ketenagakerjaan di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.
2. Untuk mengetahui bagaimana peranan dari para *Stakeholder* (pemerintah, perusahaan dan juga masyarakat) yang ada dalam *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Ketenagakerjaan Di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

#### **1.4 Batasan Masalah**

Mengingat karena banyaknya masalah yang menyangkut dalam penelitian ini maka penulis membatasi permasalahan ini, maka pembahasan dalam tulisan ini difokuskan kepada apa yang diupayakan oleh pihak *stakeholder* yaitu pihak pemerintah, swasta dan masyarakat lakukan untuk dapat membantu dan ikut andil dalam pengelolaan ketenagakerjaan yang ada di Kab. Bengkalis terkhusus di Disnaker dan daerah terkait serta bagaimana tindakan pengelolaan tersebut terjadi dan juga bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pada *collaborative governance* yang dijalankan serta pentingnya menjaga hubungan kerjasama yang kooperatif (*Feedback*) antar *stakeholder* terjaga dengan baik agar semakin menjadi lebih efektif dalam perjalanan proses pengelolaan ketenagakerjaan di Kabupaten Bengkalis”.

#### **1.5 Signifikan Penelitian**

Berdasarkan pada penelitian yang sudah pernah ada sebelumnya, maka penelitian ini membagi signifikansi penelitian menjadi dua hal, yaitu signifikansi akademik dan signifikansi praktis.

##### **1.5.1. Signifikan Akademik**

Berdasarkan temuan yang peneliti lakukan selama observasi serta sejumlah data-data yang didapat dan dikumpulkan, Peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan terkait *Collaborative Governance* dalam pengelolaan ketenagakerjaan di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Adapun studi terdahulu yang menjadi rujukan peneliti atau yang relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian milik Sidratul Khoirani yang berjudul “Kewajiban Perusahaan Menyampaikan Informasi Lowongan Kerja Kepada Dinas Tenaga Kerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan”.2018. Penelitian ini mengeksplorasi mengenai dinamika dan dampak dari adanya kebijakan mengenai kewajiban dalam hal pelaporan dari perusahaan kepada daerah terkait yang

dilakukan dalam penelitian Skripsi dan tesis di Riau pada 2018. Ini didasarkan pada wawancara kualitatif yang dilakukan dengan praktisi pengarusutamaan kewajiban dan hubungan yang kooperatif antar *Stakeholder* dalam ketenagakerjaan. Lalu dalam penelitian ini juga menggunakan alur pemikiran yang terarah kearah kolaborasi namun juga berbeda mengenai objeknya yaitu pada jurnal *Collaborative Governance* Program Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri Di Kota Pekanbaru karya Apri Yendi, Geovani Meiwanda Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, yang menjelaskan mengenai akan program dari pada pemberdayan untuk tenaga kerja mandiri yang juga merupakan suatu inovasi dari Kementrian Ketenagakerjaan dan bermitra dengan Komisi IX DPR RI, dengan tujuan untuk memperluas kesempatan kerja melalui kegiatan pelatihan dan pengembangan potensi pedesaan untuk meningkatkan dan memberdayakan ekonomi desa di seluruh Indonesia. Lalu penelitian yang relevan dengan penelitian yang sedang dikaji adalah penelitian dengan judul *Collaborative Governance* Dalam Upaya Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Semarang karya Fawwaz Aldi Tilano, Sri Suwitri dari Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univeristas Diponegoro, dengan pembahasan inti mengenai bagaimana agar dapat meminimalisir jumlah atau angka dari kecelakaan yang terjadi di kalangan tenaga kerja, serta untuk mewujudkannya diperlukan peran *stakeholders* dalam pelaksanaan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan melalui kolaborasi, karena setiap *stakeholders* tidak bisa bekerja sendirian. Dengan Hasil dari penelitian menunjukkan *collaborative governance* dalam pelaksanaan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Semarang dilihat dari kondisi awal, desain institusional dan juga dengan proses kolaboratif yang sudah berjalan baik, tetapi kepemimpinan fasilitatif belum maksimal pelaksanaannya. Faktor pendorong yang mempengaruhi kolaborasi yaitu *networked structure, commitment to a common purpose, distributive accountability/responsibility, dan information sharing*, sedangkan yang menjadi penghambat hanya faktor *access to resource*.

Penelitian yang sedang dikaji juga relevan dengan penelitian dengan judul

jurnal terkait yaitu Kolaborasi Tata Kelola Program BPJS Dalam Penanggulangan Defisit Program BPJS di Kota Bandung karya Kurhayadi, Susniwati, STIA Bandung, dapat dikatakan relevan dengan penelitian skripsi yang sedang dikaji karena menyangkut dengan kesejahteraan dan juga Kesehatan bagi tenaga kerja yang memang penting untuk di lindungi dan juga diupayakan dengan kajian jurnal berisi mengenai hal implementasi BPJS jaminan sosial yang berbasis skema iuran ini terdapat permasalahan yaitu defisit iuran yang dihimpun dengan jumlah klaim yang harus dibayar ditambah dengan beban operasional sehingga tiap tahun terus terjadi peningkatan defisit. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menjawab bagaimana proses tata kelola kolaboratif dalam penanggulangan defisit program sistem jaminan sosial nasional beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Dengan berdasarkan pada penelitian terdahulu dan juga teori serta jurnal-jurnal yang relevan dengan penelitian yang diteliti peneliti maka peneliti dapat dengan yakin bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan peneliti sebelumnya yaitu mengenai hal *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan di Bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Dengan perbedaan dari segi lokasi yang diteliti yaitu di daerah Kabupaten Bengkalis, serta bidang yang diteliti dalam *Collaborative Governance* yang baru pertama kali membahas dibidang pengelolaan ketenagakerjaan.

### **1.5.2. Signifikan Praktis**

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Strata satu di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam ‘‘45’’ Bekasi. Disamping itu, untuk Program Studi Ilmu Pemerintahan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta pengetahuan baru kepada Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam ‘‘45’’ Bekasi tentang *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Ketenagakerjaan Di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Penelitian ini pun diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap

pengembangan suatu kebijakan mengenai pentingnya peran pemerintah dalam bidang pengelolaan ketenagakerjaan dan juga hubungan yang menguntungkan antar *stakeholder*. Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar pemerintah ataupun instansi terkait dapat memberikan kontribusi dan keuletan serta keseriusan dalam upaya upaya yang dilakukan untuk dapat membantu masyarakat menuju sejahtera di bidang ekonomi atau pekerjaan di daerah dan mengurangi tingkat pengangguran daerah dengan cara adanya kolaborasi dalam pemerintahan serta dapat menunjukkan kinerja yang memang efektif dan dapat menjadikan pembangunan efektifitas dalam segala aspek dapat terwujud dengan tepat dan baik.

## **1.6 Sistematikan Penulisan**

Sistematikan penulisan merupakan suatu garis besar dalam penyusunan penelitian ini yang bertujuan untuk mempermudah dalam memahami secara keseluruhan isi dari penyusunan penelitian ini. Adapun sistematika penulisan penelitian mengenai Peran Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam Pemngelolaan Ketenagakerjaan dan Hubungan Antar *Stakeholder* di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, tersusun atas sistematika sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Dalam bab I ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang menggambarkan ruang lingkup serta kedudukan maslaah yang akan diteliti dalam bentuk uraian. Kemudian bab ini membahas perumusan masalah yang akan dijadikan fokus dari penelitian yang akan dilakukan demi mencapai hasil penelitian yang diharapkan di dalam tujuan penelitian. Tujuan penelitian mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai dari penelitian ini terhadap masalah yang sudah dirumuskan. Kegunaan penelitian yaitu menjelaskan manfaat teoritis dan praktis yang berguna bagi peneliti, pembaca, dan intansi terkait. Sistematika yang digunakan untuk mempermudah pembaca mengetahui isi dari penelitian ini secara keseluruhan serta kerangka teoritis mengkaji berbagai teori yang relavan dengan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam penelitian ini.

## **Bab II Kerangka Teori**

Bab II ini menjelaskan tentang teori yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab problematika dalam penelitian ini. Serta Kerangka pemikiran menggambarkan alur penelitian yang dikaji dengan teori yang relevan dalam penelitian, sehingga peneliti dapat merumuskan asumsi penelitian sementara.

## **Bab III Metode Penelitian**

Bab III ini bagian berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan dan tehnik-tehnik tertentu serta pengumpulan data atau bukti untuk di analisis mengenai *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Ketenagakerjaan Di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

## **Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab IV ini Bagian ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Ketenagakerjaan Di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

## **Bab V Penutup**

Bab V memuat penjelasan mengenai kesimpulan yang dibuat secara singkat, jelas, dan mudah dipahami oleh pembaca. Selain itu, peneliti memberikan usulan yang isinya untuk memantau kontribusi penelitian terhadap wilayah studi, baik secara teoritis maupun praktis. Saran praktis biasanya lebih operasional sedangkan pada aspek teoritis lebih mengarah pada pengembangan atau teori.